



LAMPUNG

PDAM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG

1. Dugaan Korupsi PDAM Way Rilau, Kejati Panggil Kepala BPKAD Bandar Lampung, Kacab Bank Mandiri, dan Kacab Bank Lampung

<https://perannews.co.id/2024/06/05/dugaan-korupsi-pdam-way-rilau-kejati-panggil-kepala-bpkad-bandar-lampung-kacab-bank-mandiri-dan-kacab-bank-lampung/> pada 24 Juni 2024.

2. Pidsus Kejati Lampung Terus Mendalami Dugaan Tipikor PDAM Way Rilau Bandarlampung

<https://mediaotentik.com/read/24250/pidsus-kejati-lampung-terus-mendalami-dugaan-tipikor-pdam-way-rilau-bandarlampung> pada 24 Juni 2024.

3. Kejati Lampung Temukan Adanya Pengkondisian Dalam Perkara Korupsi di PDAM Way Rilau

<https://lampung.viva.co.id/berita/2645-kejati-lampung-temukan-adanya-pengkondisian-dalam-perkara-korupsi-di-pdam-way-rilau> pada 24 Juni 2024

4. Kejati Lampung lakukan penyidikan dugaan Tipikor di PDAM Wayrilau

<https://www.antaranews.com/berita/4045461/kejati-lampung-lakukan-penyidikan-dugaan-tipikor-di-pdam-wayrilau> pada 24 Juni 2024

5. Korupsi Jaringan Pipa PDAM Kota Bandar Lampung, Jaksa: Ada Manipulasi Dokumen

<https://regional.kompas.com/read/2024/06/12/141134478/korupsi-jaringan-pipa-pdam-kota-bandar-lampung-jaksa-ada-manipulasi-dokumen> pada 24 Juni 2024

PDAM LIMAU KUNCI

Gawat, Dugaan Korupsi Berjamaah Antara Kabag Umum dan Dirut PDAM Tidak Tersentuh Aparat Penegak Hukum

Dugaan praktek korupsi terjadi di dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci di Kabupaten Lampung Barat, hingga saat ini belum tersentuh oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil investigasi tim Pantau Media Group, praktek korupsi tersebut adalah dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Bagian Teknik untuk pengadaan pipa HDPE, kemudian pengadaan water meter untuk Unit Way Tenong, dan memalsukan tanda tangan seluruh Kepala Unit untuk pengeluaran dana perayaan HUT RI. Total korupsi diperkirakan hingga ratusan juta rupiah.

(Sumber: <https://pantaulampung.com/2023/11/22/gawat-dugaan-korupsi-berjamaah-antara-kabag-umum-dan-dirut-pdam-tidak-tersentuh-aparat-penegak-hukum/> tanggal 22 November 2023).

PT BPRS LAMPUNG TIMUR

Diduga Korupsi, DPD KAMPUD Lampung Timur Desak Bupati Evaluasi Pengelolaan PT BPRS Lamtim Oleh Direksi Lembaga Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) telah melaporkan dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) terkait pengelolaan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Timur (BUMD) ke Kejaksaan Tinggi Lampung, pasalnya pihak Direksi PT BPRS Lamtim diduga tetap menggunakan pedoman yang sudah tidak berlaku, yakni Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 untuk tahun buku dan penggunaan laba RUPS di tahun 2017, 2018, dan 2019 yang menghasilkan keputusan yang berpotensi merugikan PAD Pemerintah Daerah Lampung Timur. Selain itu, PT. BPRS Lampung Timur terindikasi tidak melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility yang dihitung sebesar 3% dari laba setiap tahun buku, parahnya lagi ada pernyataan sejumlah karyawan perusahaan bahwa penerimaan gaji mereka tidak sesuai dengan ketentuan dan diduga dipotong pihak Direksi

(Sumber: <https://jnnews.co.id/diduga-korupsi-dpd-kampud-lampung-timur-desak-bupati-evaluasi-pengelolaan-pt-bprs-lamtim-oleh-direksi/> tanggal 18 Januari 2022).

PDAM WAY RILAU

Dugaan Korupsi PDAM, Kejati Lampung Panggil Sejumlah Pihak
Kejaksaan Tinggi Lampung kembali memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi pada pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi sistem pompa SPAM Bandar Lampung tahun 2019 di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau, Kota Bandar Lampung. Dari pemeriksaan ditemukan adanya perbuatan pengkondisian terhadap pemenang tender, manipulasi dokumen pengadaan, dan dengan sengaja melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kontrak, sehingga menyebabkan kekurangan volume pada pekerjaan yang berakibat terjadinya kerugian negara oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tersebut. Dalam kasus dugaan korupsi ini, Kejati Lampung menyatakan ada potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,22 miliar.

(Sumber: <https://www.rri.co.id/hukum/732950/dugaan-korupsi-pdam-kejati-lampung-panggil-sejumlah-pihak> tanggal 3 Juni 2024)